

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2023 menggunakan pendekatan Tipologi Klassen, serta dikaitkan dengan indikator sosial berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dijelaskan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan teori yang digunakan:

1. Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2023 masih terjadi, namun menunjukkan pola perbaikan. Berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan Tipologi Klassen terhadap 38 kabupaten/kota, ditemukan bahwa sebagian besar wilayah pada tahun 2019 masih berada di Kuadran III dan IV, yaitu wilayah dengan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang rendah. Namun, hingga tahun 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah wilayah di Kuadran I dan II, yang menunjukkan bahwa sebagian daerah telah mengalami perbaikan dalam aspek pertumbuhan dan pendapatan regional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan belum sepenuhnya hilang, namun tren menuju pemerataan mulai terbentuk. Temuan ini sejalan dengan teori Perencanaan Pembangunan dari Siagian (2004) yang menyatakan bahwa perencanaan harus dilakukan secara sistemik dan berkeadilan agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh wilayah yang sudah berkembang saja.

2. PDRB per kapita terbukti menjadi salah satu faktor utama yang menentukan klasifikasi wilayah dalam Tipologi Klassen, dan menjadi indikator penyebab ketimpangan spasial. Daerah dengan nilai PDRB per kapita di atas rata-rata provinsi umumnya berada pada Kuadran I dan II (misalnya: Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik), sedangkan wilayah dengan PDRB per kapita rendah (seperti Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan) cenderung menempati Kuadran IV. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber ekonomi, infrastruktur, dan kapasitas daerah dalam menciptakan pendapatan memiliki hubungan erat dengan ketimpangan wilayah. Temuan ini membuktikan relevansi teori dari Kuncoro (2010) yang menyebutkan bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan akan menciptakan ketimpangan ekonomi antarwilayah.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga menjadi penentu posisi wilayah dalam klasifikasi kuadran, meskipun tidak selalu paralel dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur disarankan untuk meningkatkan analisis dan pemantauan laju pertumbuhan ekonomi secara spasial guna mengidentifikasi wilayah dengan pertumbuhan rendah. Pendekatan spasial ini penting agar intervensi pembangunan dapat difokuskan pada wilayah tertinggal (Kuadran IV), serta mendorong pemerataan pertumbuhan antarwilayah. Penguatan sektor unggulan lokal dan koordinasi lintas wilayah juga perlu ditingkatkan agar LPE dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah dengan LPE tinggi belum tentu memiliki IPM tinggi atau tingkat kemiskinan rendah, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak

merata dan tidak berbasis pada sektor yang produktif dan menyerap tenaga kerja.

Hal ini menguatkan pernyataan Gunnar Myrdal dalam teori Cumulative Causation bahwa pertumbuhan yang tidak disertai dengan distribusi yang merata akan memperparah ketimpangan, karena efek pertumbuhan hanya akan dinikmati oleh pusat-pusat pertumbuhan yang sudah maju.

4. Ketimpangan pembangunan terbukti berkorelasi dengan capaian IPM dan tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi berdampak langsung pada ketimpangan sosial. Daerah-daerah yang berada di Kuadran IV, seperti Kabupaten Sampang, Sumenep, dan Bangkalan, tercatat memiliki IPM yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebaliknya, daerah yang berada di Kuadran I dan II, seperti Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo, memiliki IPM tinggi dan kemiskinan yang rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa ketimpangan spasial tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori ketimpangan struktural dari Myrdal, bahwa daerah yang tertinggal akan semakin sulit mengejar ketertinggalan apabila tidak ada intervensi aktif dari pemerintah.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Jawa Timur nyata secara spasial dan memengaruhi kondisi sosial masyarakat, serta membuktikan teori dari Siagian, Kuncoro, dan Myrdal yang menyatakan bahwa pembangunan yang tidak merata akan menciptakan disparitas antarwilayah baik secara ekonomi maupun sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disampaikan beberapa saran berikut:

1. Diperlukan upaya evaluasi dan perencanaan pembangunan yang lebih adil antarwilayah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan menggunakan hasil klasifikasi tipologi Klassen sebagai dasar penyusunan kebijakan wilayah, khususnya untuk daerah yang secara konsisten berada di Kuadran IV (relatif tertinggal). Wilayah-wilayah ini memerlukan prioritas dalam alokasi anggaran, penguatan infrastruktur, serta intervensi sosial ekonomi untuk mendorong percepatan pembangunan..
2. Disarankan agar kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan PDRB per kapita, tetapi juga memperhatikan pemerataan antarwilayah. Pemerintah daerah perlu menyusun program pengembangan ekonomi yang merata, agar wilayah dengan PDRB per kapita rendah tidak tertinggal secara struktural. Pendekatan spasial dalam distribusi investasi dan bantuan pembangunan sangat penting untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Penguatan sinergi pusat-daerah sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis data spasial. Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis ketimpangan wilayah.
3. Pemerintah perlu melakukan pemantauan LPE secara spasial secara rutin untuk mengetahui dinamika pertumbuhan tiap wilayah. Wilayah dengan pertumbuhan rendah sebaiknya mendapatkan pendampingan dan strategi penguatan sektor-sektor potensial, agar tidak terus-menerus berada di posisi yang stagnan atau tertinggal. Pemerintah juga dapat mengembangkan model perencanaan berbasis wilayah (regional planning) untuk meningkatkan sinergi antarwilayah.
4. Disarankan agar intervensi pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan kualitas pembangunan manusia dan

penanggulangan kemiskinan. Ketimpangan pembangunan terbukti berkorelasi dengan IPM yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi, terutama di wilayah Kuadran IV. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus menempatkan peningkatan IPM dan pengurangan kemiskinan sebagai indikator utama keberhasilan, sejalan dengan teori administrasi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *Laporan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dwiyani, A. N. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Bali dengan Tipologi Klassen. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(1), 45–57.
- Evra Yunita, A. (2016). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 101–112.
- Ervina, Y. (2020). Ketimpangan Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(4), 443–455.
- Kuncoro, M. (2012). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Klassen, J. (1960). *Typology of Regional Development*. Munich: OECD.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.
- Myrdal, G. (1968). *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*. New York: Pantheon.
- Siagian, S. P. (2004). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.k
- Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2003). Poverty and Vulnerability in Indonesia Before and After the Economic Crisis. *Asian Economic Journal*, 17(1), 45–64.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley.
- Waldo, D. (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press.

Jefri Darmawan & Tukiman. (2020). Analisis Dimensi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2018. *Jurnal Dinamika Governance*, 10(2), 155–168.

Dwiyani, L. S. (2022). Ketimpangan Ekonomi Wilayah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Bali. *Jurnal Ekonomi Regional*, 4(1), 34–48.

Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Manajemen Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). *PDRB Kabupaten/Kota Menurut Atas Dasar Harga Konstan dan ADHB 2019–2023*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Surabaya: BPS.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.

Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori & Aplikasi)* (1st ed.). Yogyakarta: Gava Media.

Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Buku Ajar : Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Surabaya: Airlangga University Press.

Aslichati, L., Prasetyo, B., & Irawan, P. (2017). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Feriyanto, A., & Triana, E. S. (2015). *Pengantar Manajemen (3 in 1)* (Jarwanto). Kebumen: Mediatara.

Ginting, A. M. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20(1), 45–58.

Gregory, A. (2007). *Planning and Managing Public Relations Campaigns*. (N. Jean Cussons Typesetting, Diss, Ed.), *Journal of Experimental Psychology: General* (Ketiga, Vol. 136). London: Replika Press.

- Imelia. (2011). Analisis Ekonomi Antar Wilayah di Provinsi Jambi. *Paradigma Ekonomika*, 1(4), 62–72.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Signifikan*, 4(1), 41–66.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk agenda Pembangunan Pasca -2015. (2013). *Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015*. (A. Santos, Ed.). Yogyakarta: Insist Press.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. (S. Saat & W. Hardani, Eds.) (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, I., & Anggara, S. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. (B. A. Saebani, Ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Utomo, T. W. W. (1998). *Administrasi Pembangunan (Ringkasan Materi dan Transparansi)*. (Lembaga Administrasi Negara, Ed.) (1st ed.). Bandung: Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat.
- Barokah, N. (2017). *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Kajian Dimensi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Cilacap)*. Universitas Jenderal Soedirman.